



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 18/HM.02-Kpt/7602/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan data dan informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat dan pendokumentasian kegiatan serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum agar dapat berjalan lancar, baik, tertib, akurat, valid dan bermanfaat maka perlu penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dari bulan Februari-Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 10 Februari 2022

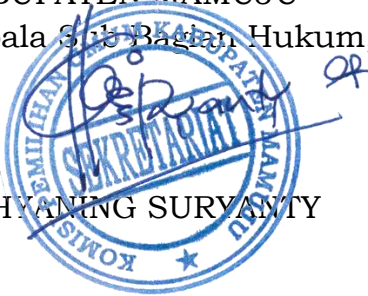
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

HAMDAN DANGKANG

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 18/HK.02-Kpt/7602/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMUJU

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN MAMUJU

**A. DEWAN PEMBINA**

1. HAMDAN DANGKANG
2. ASRIANI
3. AHMAD AMRAN NUR
4. HASDARIS
5. MUHAMMAD RIVAI

**Pembina PPID berwenang :**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

**B. Tim Pertimbangan PPID**

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari :

1. HASDARIS
2. ASRIANI
3. CAHYANING SURYANTY
4. TRISDIANA

**Tim Pertimbangan** berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

### **C. ATASAN PPID**

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju : **ASWAN HUSAIN**

#### **Atasan PPID berwenang**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah sesuai dengan peraturan perundangan.

### **D. PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi)**

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas : **ROS PRATIWI ASNUR**

#### **PPID berwenang :**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
2. Menghimpun informasi public dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

#### **E. Desk Pelayanan**

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah **ANDI TENRI WULANG** **Desk Pelayanan** berwenang membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

#### **F. Tim Penghubung**

Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi terdiri atas:

1. ABDY
2. AHMAD FAUZI R
3. MUHAMMAD AKBAR
4. MUSDALIFAH MAHYUDDIN

Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi public kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

HAMDAN DANGKANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 18/HK.02-Kpt/7602/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMUJU

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI KPU KABUPATEN MAMUJU



Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

